

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR GRATIS DALAM UPAYA PENINGKATAN KENYAMANAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TRENGGALEK

Maulvy Aulya Ramadhani¹, Yuke Tinarawati², Naswa Nur Riski Amelia³, Charisma Putri Bali⁴, Laily Purnawati⁵

Email: maulvyaulya8@gmail.com¹, yuketinarawati556@gmail.com²,
naswaamelia2606@gmail.com³, crhissajaya@gmail.com⁴

Universitas Tulungagung

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the free parking policy in improving public comfort in Trenggalek Regency. The free parking policy was introduced as a form of public service to reduce the financial burden on the community and to enhance order and comfort in public spaces. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving relevant stakeholders, including local government officials, parking attendants, and community members as users of parking facilities. The findings indicate that the implementation of the free parking policy has generally had a positive impact on improving public comfort, particularly in terms of accessibility and satisfaction with public services. However, several challenges remain, such as inadequate supervision, limited infrastructure, and the potential emergence of illegal parking practices. Therefore, stronger inter-agency coordination and improved supervision are required to ensure the effective and sustainable implementation of the free parking policy.*

Keyword: *Policy Effectiveness, Free Parking, Public Service, Public Comfort, Trenggalek Regency.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan parkir gratis dalam upaya meningkatkan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Kebijakan parkir gratis diterapkan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik untuk mengurangi beban biaya masyarakat serta menciptakan keteraturan dan kenyamanan di ruang publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak terkait, seperti aparat pemerintah daerah, petugas parkir, serta masyarakat pengguna fasilitas parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir gratis secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kenyamanan masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses dan kepuasan terhadap pelayanan publik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sarana prasarana, serta potensi munculnya parkir liar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan pengawasan agar kebijakan parkir gratis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Parkir Gratis, Pelayanan Publik, Kenyamanan Masyarakat, Kabupaten Trenggalek.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks transportasi dan tata kota, salah satu sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari adalah pengelolaan perparkiran. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat, kebutuhan akan lahan parkir yang tertib, aman, dan nyaman menjadi semakin mendesak (Andry & Zulkifly, 2023). Pengelolaan parkir yang buruk tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat akibat praktik pungutan liar dan pelayanan yang tidak transparan (Indiati dkk., 2025).

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem perparkiran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus sebagai bentuk pelayanan masyarakat. Di berbagai daerah di Jawa Timur, strategi pengelolaan parkir telah

bertransformasi dari sistem konvensional (bayar di tempat) menuju sistem berlangganan atau parkir gratis di tepi jalan umum. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan kebocoran retribusi, menghilangkan praktik percaloan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik (Isminingtias, 2017).

Kabupaten Trenggalek, sebagai salah satu daerah yang terus berkembang, menerapkan kebijakan Parkir Gratis (atau retribusi berlangganan/pembebasan tarif di titik tertentu) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menghapus stigma negatif tentang "juru parkir liar" dan memberikan kepastian layanan tanpa biaya tambahan di lokasi yang telah ditentukan. Namun, implementasi sebuah kebijakan publik seringkali menghadapi kesenjangan (gap) antara harapan (das sollen) dan kenyataan di lapangan (das sein).

Berdasarkan studi terdahulu di wilayah dengan kebijakan serupa, terdapat berbagai kendala dalam implementasi yang berpotensi terjadi juga di Kabupaten Trenggalek. Penelitian (Ferisiyansyah & Megawati, 2022) di Kabupaten Sidoarjo menemukan fenomena "bayar ganda" (double burden), di mana masyarakat yang sudah membayar retribusi berlangganan tetap dipungut uang oleh juru parkir di lapangan. Hal ini tentu mencederai rasa nyaman masyarakat yang seharusnya mendapatkan layanan gratis. Senada dengan itu, penelitian (Ferisiyansyah & Megawati, 2022) di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan kurang tegasnya petugas juru parkir menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan.

Di sisi lain, aspek "Kenyamanan Masyarakat" dalam layanan parkir tidak hanya diukur dari gratis atau tidaknya biaya. Penelitian (Pradita & Utomo, 2021) di Surakarta menekankan bahwa transparansi, keamanan, dan sikap juru parkir adalah elemen vital dalam menciptakan kenyamanan. Jika kebijakan parkir gratis di Trenggalek hanya fokus pada penghapusan biaya tetapi mengabaikan pembinaan juru parkir dan ketersediaan fasilitas, maka tujuan peningkatan kenyamanan masyarakat sulit tercapai. Kasus di Kabupaten Tuban juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan berjalan cukup efektif, masih ditemukan juru parkir yang tidak disiplin dan kurang memperhatikan pengguna jasa, yang pada akhirnya mengurangi kualitas pelayanan (Faj'rina & Wibawani, 2024).

Efektivitas implementasi kebijakan parkir gratis di Kabupaten Trenggalek menjadi menarik untuk diteliti karena kebijakan ini merupakan political will pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan prima. Namun, tantangan berupa resistensi juru parkir, sosialisasi yang belum merata, serta pengawasan di lapangan menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini. Apakah kebijakan parkir gratis ini benar-benar meningkatkan kenyamanan masyarakat Trenggalek, atau justru menimbulkan masalah baru berupa penurunan kualitas layanan akibat hilangnya insentif langsung bagi juru parkir.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, serta melihat urgensi evaluasi terhadap pelayanan publik di sektor transportasi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Implementasi Kebijakan Parkir Gratis dalam Upaya Peningkatan Kenyamanan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam, khususnya bagaimana kebijakan parkir gratis diimplementasikan serta bagaimana interaksi antara juru parkir dengan masyarakat terjadi di lapangan. Data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, serta informasi lisan atau tertulis yang diperoleh dari informan, sehingga tidak berfokus pada angka-angka statistik.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan efektivitas implementasi kebijakan parkir gratis di Kabupaten

Trenggalek berdasarkan kondisi nyata di lapangan (das sein) dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku (das sollen). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap kenyamanan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Implementasi Kebijakan Parkir Gratis Ditinjau dari Teori Edward III

Analisis efektivitas implementasi kebijakan parkir gratis di Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan menggunakan empat variabel utama menurut George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi kebijakan mencakup proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan dan juru parkir, ditemukan bahwa:

a. Transmisi Informasi Belum Merata

Mengenai ketentuan parkir gratis telah dilakukan, namun tidak merata pada seluruh titik parkir. Beberapa juru parkir menyatakan bahwa mereka “pernah mendengar” mengenai kebijakan ini tetapi belum mendapatkan arahan teknis mengenai prosedur pelayanan di lapangan.

b. Kejelasan Informasi Kurang Optimal

Masih ditemukan juru parkir yang bingung mengenai area mana saja yang termasuk zona gratis. Minimnya rambu penanda menyebabkan masyarakat juga mengalami keraguan, sehingga tidak ada keseragaman informasi antara petugas dan pengguna layanan.

c. Konsistensi Instruksi Belum Terjaga

Di beberapa lokasi, ditemukan perbedaan penafsiran mengenai larangan memungut biaya. Ada juru parkir yang mengatakan bahwa pungutan masih diperbolehkan apabila “seikhlasnya”, meskipun peraturan menyatakan bahwa kawasan tersebut gratis sepenuhnya.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi belum terlaksana secara efektif. Kurangnya konsistensi instruksi dan minimnya penanda di lapangan berdampak pada interpretasi yang berbeda-beda baik oleh juru parkir maupun masyarakat.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa:

a. Keterbatasan Jumlah Juru Parkir Resmi

Tidak semua titik parkir gratis memiliki juru parkir resmi. Beberapa titik justru dijaga oleh juru parkir liar yang tidak terdaftar di Dishub, sehingga implementasi kebijakan tidak dapat dipantau dengan baik.

b. Kurangnya Fasilitas Fisik

Beberapa rambu “Parkir Gratis” berada dalam kondisi kurang layak atau jumlahnya terbatas. Marka jalan juga tidak jelas, sehingga masyarakat sulit membedakan area gratis dan area berbayar.

c. Atribut Pelaksana Tidak Lengkap

Tidak semua juru parkir menggunakan atribut resmi seperti rompi, ID card, atau karcis. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan membuka peluang praktik pungutan liar.

d. Insentif Juru Parkir Tidak Memadai

Insentif atau gaji yang diterima juru parkir dianggap rendah. Kondisi ini berdampak pada perilaku sebagian petugas yang masih menarik pungutan dari masyarakat untuk menambah pendapatan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya belum mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap para pelaksana kebijakan menentukan keberhasilan implementasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa:

a. Sikap Juru Parkir Bervariasi

Sebagian juru parkir mendukung kebijakan dan menjalankan tugas tanpa melakukan pungutan. Namun ada juga yang menolak secara tidak langsung dengan cara tetap menarik uang meskipun hanya “seikhlasnya”.

b. Motivasi Pelaksana Rendah

Minimnya insentif menjadi faktor utama rendahnya motivasi juru parkir untuk menjalankan tugas sesuai SOP. Mereka merasa bahwa kebijakan parkir gratis tidak memberikan keuntungan finansial langsung.

c. Perilaku Pelayanan Belum Konsisten

Masyarakat mengeluhkan bahwa juru parkir tidak selalu aktif membantu mengarahkan kendaraan. Terdapat variasi pelayanan antara satu titik dengan titik lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, disposisi pelaksana dapat dikategorikan belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan, sehingga berdampak pada kinerja pelayanan di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup SOP dan mekanisme koordinasi antar lembaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa:

a. SOP Sudah Tersedia tetapi Belum Dijalankan Secara Menyeluruh

Dinas Perhubungan telah menetapkan SOP parkir gratis, namun juru parkir di lapangan mengakui bahwa mereka belum memahami SOP secara utuh.

b. Pengawasan Lapangan Masih Lemah

Pengawasan tidak dilakukan secara rutin. Pada beberapa titik, juru parkir tidak diawasi sehingga pelanggaran seperti pungutan liar tetap terjadi.

c. Koordinasi Antar Lembaga Kurang Intensif

Koordinasi antara Dishub, Polres, dan Satpol PP belum berjalan optimal. Penindakan terhadap juru parkir yang melanggar belum dilakukan secara konsisten.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan parkir gratis di Kabupaten Trenggalek berdasarkan empat aspek Edward III dapat dikategorikan belum efektif. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi, minimnya fasilitas, rendahnya motivasi juru parkir, serta lemahnya pengawasan.

B. Dampak Penerapan Kebijakan Terhadap Peningkatan Kenyamanan Masyarakat

Dampak kebijakan diukur berdasarkan indikator kenyamanan masyarakat (Transparansi, Perilaku, Keamanan, Fasilitas) sebagaimana dirujuk dari Pattipeilohy dkk. (2024).

1. Kepastian Biaya (Transparansi)

Masyarakat merasa nyaman atau tidak nyaman karena masih adanya ketidakpastian. Di satu sisi ada label "Gratis", namun di sisi lain ada tekanan psikologis (rasa sungkan) untuk membayar. Fenomena double burden (bayar pajak + bayar parkir) masih dirasakan sebagian masyarakat Trenggalek.

2. Perilaku Juru Parkir

Kenyamanan masyarakat terganggu ketika juru parkir bersikap pasif (hanya duduk) atau memaksa meminta uang namun tidak membantu. Walaupun tidak diminta secara terang-terangan, sebagian juru parkir memberikan isyarat non-verbal seperti memegang tangan di pinggang atau berdiri dekat motor, yang ditafsirkan masyarakat sebagai permintaan uang. Hal ini menciptakan psychological pressure sehingga masyarakat merasa sungkan.

3. Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat merasa lebih aman ketika juru parkir memakai seragam atau atribut resmi. Di beberapa titik, karena tidak adanya pungutan dan kurangnya pengawasan aktif, pengguna kendaraan menempatkan motor secara sembarangan, sehingga menyebabkan kerusakan kecil pada kendaraan seperti resiko gesekan antar kendaraan. Kebijakan parkir gratis belum sepenuhnya meningkatkan ketertiban. Pada titik-titik tertentu, bahkan justru muncul kekacauan karena lemahnya pengaturan kendaraan.

Secara umum, dampak peningkatan kenyamanan belum optimal karena masyarakat masih dibayangi keraguan antara hak mendapatkan layanan gratis dan kebiasaan sosial memberi uang parkir.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, serta analisis dokumen kebijakan, ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan parkir gratis di

Kabupaten Trenggalek. Faktor-faktor tersebut dikategorikan menjadi faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut.

1. Faktor Pendukung

a. Regulasi yang Jelas

Adanya Peraturan Bupati/Perda yang menetapkan titik parkir gratis menjadi payung hukum yang kuat sehingga implementasi memiliki dasar legal yang jelas.

b. Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk operasional perparkiran, termasuk pemberian insentif bagi juru parkir tertentu. Dukungan ini menunjukkan komitmen dalam mendukung keberlangsungan kebijakan.

c. Respons Positif Masyarakat

Sebagian besar masyarakat mendukung kebijakan karena dapat meringankan beban ekonomi dan mengurangi pungutan liar. Dukungan publik ini menjadi modal sosial penting bagi keberhasilan implementasi.

d. Komitmen Dinas Perhubungan

Dishub telah menyiapkan SOP, melakukan sosialisasi awal, serta menetapkan lokasi parkir gratis, yang menjadi fondasi administratif dalam pelaksanaan kebijakan.

2. Faktor Penghambat

1. Faktor Ekonomi Juru Parkir

Insentif yang tidak memadai atau tidak diterima secara rutin mendorong sebagian juru parkir melakukan pungutan tidak resmi. Hal ini sejalan dengan temuan Solichin (2025) bahwa motif ekonomi menjadi penyebab utama resistensi pelaksana.

2. Budaya Masyarakat yang Permisif

Kebiasaan “ewuh pakewuh” membuat masyarakat tetap memberikan uang meskipun sudah ada ketentuan gratis. Sikap permisif ini melanggengkan praktik pungutan liar dan menyulitkan perubahan perilaku juru parkir.

3. Lemahnya Pengawasan

Keterbatasan personil Dishub menyebabkan tidak semua titik parkir dapat dipantau secara rutin. Lemahnya pengawasan membuat pelanggaran tidak tertangani secara konsisten.

4. Minimnya Fasilitas Penunjang

Rambu “Parkir Gratis”, marka parkir, dan atribut juru parkir masih terbatas. Minimnya fasilitas ini menimbulkan keraguan masyarakat serta membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar.

5. Resistensi Pelaksana di Lapangan

Sebagian juru parkir belum menerima kebijakan secara penuh karena khawatir kehilangan pendapatan, sehingga muncul penolakan terselubung melalui tindakan tidak mematuhi SOP.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas implementasi kebijakan parkir gratis di Kabupaten Trenggalek, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Implementasi: Ditinjau dari teori Edward III, implementasi kebijakan parkir gratis di Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya efektif.

- a. Komunikasi sudah berjalan namun belum konsisten sampai ke level teknis lapangan.
- b. Sumber Daya masih terkendala pada fasilitas rambu yang minim dan isu kesejahteraan (gaji) juru parkir.
- c. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya resistensi di mana juru parkir masih mengharapkan “uang jasa” dari masyarakat.
- d. Struktur Birokrasi (SOP) telah tersedia namun lemah dalam penegakan (enforcement).

2. Dampak Kenyamanan

Kebijakan ini secara konsep meningkatkan kenyamanan karena menghilangkan biaya. Namun dalam praktiknya, kenyamanan masyarakat tercederai oleh ketidakpastian (ambiguitas) di lapangan. Masyarakat masih merasa cemas atau sungkan jika tidak membayar, serta mengeluhkan pelayanan juru parkir yang kurang profesional.

3. Faktor Determinan

Faktor penghambat utama bukan pada regulasi, melainkan pada faktor kultural masyarakat yang terbiasa memberi dan faktor ekonomi juru parkir yang merasa insentif dari pemerintah belum mencukupi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Dinas Perhubungan):

- a. Perlu mempertegas sanksi bagi juru parkir yang terbukti menerima atau meminta uang di zona gratis.
- b. Memperbaiki sistem penggajian/insentif juru parkir agar mereka tidak lagi bergantung pada pungutan liar untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- c. Memasang rambu "PARKIR GRATIS - DILARANG MEMBERI TIPS" yang besar dan mencolok di setiap titik strategis untuk mengedukasi masyarakat.

2. Bagi Juru Parkir

Meningkatkan profesionalisme pelayanan dengan menerapkan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dan membantu menata kendaraan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab atas gaji yang diterima dari pemerintah.

3. Bagi Masyarakat

Perlu mengubah kebiasaan memberi uang parkir di lokasi gratis untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini dan memutus rantai pungutan liar. Masyarakat harus berani melapor jika ada paksaan pungutan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode kuantitatif untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat secara lebih terukur atau meneliti model pengawasan berbasis teknologi (e-parking) sebagai solusi alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, H., & Zulkifly. (2023). Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- Erfina, E., Lukman, L., Hardianti, H., & Budai, B. B. (2025). Illegal Parking Control Strategy to Improve Sustainable Management of Urban Areas. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(1), 112–124. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v12i1.24802>
- Faj'rina, F. S. N., & Wibawani, S. (2024). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Tuban.
- Fatimah, S., & Rodiyah, I. (2018). Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(2), 155–171. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3010>
- Ferisiyansyah, T., & Megawati, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SAMPANG.
- Hasanah, U., Senain, & Rahman, D. S. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO.
- Hikmawan Nur Iman, A., & Hariwibowo, F. (2025). The Effect of on-Street Parking on Traffic Performance in Commercial Areas of Small Cities in Indonesia (Case Study: St. Merdeka Utara Cirebon). *Indonesian Journal of Social Technology*, 6(2). <http://jst.publikasiindonesia.id/>
- Indiati, Lita Juniati, & Suryo Hartoko Minarwanto. (2025). Implementation of the Road Agency Policy as a Parking Area for Kayutangan Heritage Malang City. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 9. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.244>
- Isminingtias, S. (2017). Kebijakan dan Manajemen Publik DAMPAK PENATAAN PARKIR BADAN JALAN TERHADAP ESTETIKA KOTA DI KAWASAN NIAGA KOTA SURABAYA.
- Pattipeilohy, J. A., Tui, F. P., & Tantu, R. (2024). Efektivitas Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Gorontalo. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>
- Pradita, S., & Utomo, I. H. (2021). EFEKTIVITAS SISTEM PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKIR) DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS JALAN DR. RADJIMAN).
- Solichin, N. M., Oktaviyanti, I., & Nuraini, D. (2025). Paradoks Masalah dalam Praktik Parkir Gratis: Analisis Tindakan Sosial dan Masalah Mursalah di Salatiga.